

KEWASPADAAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN BELA NEGARA

Hazen Alrasyid¹, Kasim² & George Royke Deksino³

Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan^{1,2,3}

Email : hazen.alrasyid@tp.idu.ac.id¹

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia. Sebagai negara penghasil minyak sawit, minyak kelapa sawit Indonesia tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga merambah ke pasar internasional untuk kegiatan ekspor. Dengan status sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, hal ini tentu harus mempertimbangkan unsur kewaspadaan nasional, sebagai upaya dalam melakukan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi ancaman. Termasuk ancaman kelangkaan minyak goreng karena dengan kenaikan harga jual minyak goreng akhir-akhir ini, menjadikan minyak goreng sebagai pusat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab fenomena kelangkaan minyak goreng dan mengetahui bagaimana seharusnya regulasi pemerintah, pelaku industri dan kondisi masyarakat dalam menyikapi fenomena kelangkaan minyak goreng bila dikaitkan dengan unsur kewaspadaan nasional sebagai perwujudan sikap bela Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Kewaspadaan Nasional adalah konsep yang harus terus hadir dalam sistem penyelenggaraan negara atau sistem nasional kita, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk dalam menghadapi ketidaksiapan dalam penanganan kelangkaan minyak goreng. Sikap Bela Negara sudah seharusnya menjadi dasar dan semangat dalam setiap tindakan. Mental bela Negara diharapkan mampu mengurangi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kelangkaan minyak goreng untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi sebaliknya kondisi kelangkaan minyak goreng menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bergotong royong menyelesaikan persoalan dari berbagai elemen masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing.

Kata kunci: Bela Negara, Kelangkaan Minyak Goreng, Kewaspadaan Nasional

Abstract

Indonesia is the second-largest supplier of palm oil. As the largest palm oil producing country in the world, Indonesian palm oil is not only intended to fulfill the domestic needs but also to fulfill the international market for export activities. With the status as the largest palm oil producing country in the world, this certainly must consider the element of national vigilance, as an effort to take early preparedness in the face of threats. Including the threat of scarcity of cooking oil due to the recent increase in the selling price of cooking oil, making cooking oil the center of attention. This research aims to determine the factors causing the cooking oil scarcity phenomenon and to find out how government regulations, industry players and community conditions should respond to the cooking oil scarcity phenomenon when associated with elements of national vigilance as a manifestation of the attitude of national defense. The method used in this research is a qualitative approach. The data collection technique uses literature study. The results of the research obtained are that National Vigilance is a concept that must continue to be present in the state administration system or our national system, in the encounter of various threats, included in the encounter of unpreparedness in handling the scarcity of cooking oil. The attitude of National Defense should be the basis and spirit in every action. The mental National Defense is expected to be able to reduce parties who take advantage of the scarcity of cooking oil for personal interests and gains, but in another hand, the condition of the scarcity of cooking oil becomes a momentum to help each other and work together to solve problems from various elements of society according to their respective professions.

Keywords: National Defense, Scarcity of Cooking Oil, National Precautions



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dari rangkaian pulau-pulau yang disebut kepulauan nusantara, secara geografis disatukan oleh lautan dilewati garis edar matahari yang dikenal sebagai garis katulistiwa (Fadli, 2018). Hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat. Salah satu komoditi perkebunan yang meningkat tajam adalah perkebunan kelapa sawit. Adapun luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta Hektare (Ha) pada 2021. Dari luas total tersebut, mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 55,8%, kemudian dikuasai oleh Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 40,34% dan Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 3,84%. Selain itu, jumlah produksi kelapa sawit Indonesia juga meningkat seiring bertambah luasnya perkebunan. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, minyak kelapa sawit ini tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga merambah ke pasar internasional untuk kegiatan ekspor. Dengan meningkatnya permintaan akan minyak nabati dunia seiring bertambahnya jumlah penduduk menjadikan minyak kelapa sawit ini banyak diminati. (Kementerian Pertanian, 2021).

Dengan status sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia ini tentu harus mempertimbangkan unsur kewaspadaan nasional. Kewaspadaan Nasional diartikan sebagai sikap kesiapsiagaan dalam ruang lingkup bangsa Indonesia dalam melakukan aksi pencegahan secara menyeluruh terhadap bentuk potensi ancaman NKRI, kemudian mengantisipasi dan mendeteksi bentuk ancaman tersebut (Media Informasi Kementerian Pertahanan. 2017). Termasuk ancaman kelangkaan minyak goreng karena dengan kenaikan harga jual minyak

goreng akhir-akhir ini, menjadikan minyak goreng sebagai pusat perhatian. Faktor *supply* dan *demand* menjadi kunci dalam penentuan harga minyak goreng yang juga memicu pada kelangkaan minyak goreng. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa negara Indonesia masih rawan dalam ketahanan pangan nasional, padahal kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. Untuk itu, sangat di sayangkan terjadinya fenomena kelangkaan minyak goreng. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab fenomena kelangkaan minyak goreng dan juga bagaimana seharusnya regulasi pemerintah, pelaku industri dan kondisi masyarakat dalam menyikapi fenomena kelangkaan minyak goreng jika dilihat dari unsur kewaspadaan nasional sebagai perwujudan sikap bela Negara.

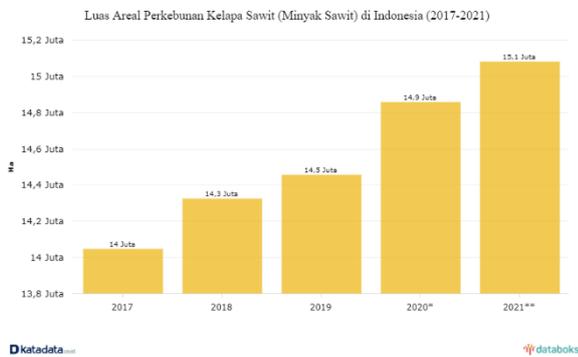
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dengan cara mempelajari kemudian mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan bahasan atau topik sehingga memperoleh data dan informasi tertulis yang ada kaitannya atau berhubungan dengan masalah yang dikemukakan (Regiani & Dewi, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena mempunyai kondisi tanah yang subur yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa. Maka hal ini menjadikan Salah satu komoditi perkebunan yang meningkat tajam adalah perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit

yang terus meningkat, seperti yang tercatat pada Kementerian Pertanian luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta Hektare (Ha) pada 2021 seperti grafik dibawah ini.



Gambar 1. Grafik Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Minyak Sawit) di Indonesia (2017-2021)

Sumber : Kementerian Pertanian

Dari luas total tersebut, mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 55,8%, kemudian dikuasai oleh Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 40,34% dan Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 3,84%. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mencatat bahwa jumlah produksi kelapa sawit Indonesia juga meningkat seiring bertambah luasnya perkebunan. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, minyak kelapa sawit ini tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga merambah ke pasar internasional untuk kegiatan ekspor. Dengan meningkatnya permintaan akan minyak nabati dunia seiring bertambahnya jumlah penduduk menjadikan minyak kelapa sawit ini banyak diminati. Kelapa sawit merupakan komoditi penghasil minyak goreng utama di Indonesia yang telah berlangsung lama (Purba, 2021). Kelapa sawit diolah menjadi dua bagian yaitu berupa CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah dan PKO (Palm Kernel Oil) atau minyak inti sawit. CPO yang dihasilkan

dari daging buah kelapa sawit sedangkan PKO dihasilkan dari bagian inti atau biji keras kelapa sawit (Larasati dkk, 2016).

Produk hilirisasi dari minyak kelapa sawit mengalami kemajuan dengan kapasitas produksi minyak goreng mencapai 15,3 juta ton (Kemenperin, 2021). Minyak goreng merupakan produk turunan minyak kelapa sawit, dimana yang menjadi bahan baku utamanya adalah minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) (Damarani dkk, 2019). Dengan terjadinya peningkatan harga minyak sawit dunia yang menyentuh harga 2.010 USD per ton pada Bursa Komoditas Rotterdam (Databoks, 2022). Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi minyak goreng. Dalam memproduksi minyak goreng biaya untuk bahan baku memiliki porsi terbesar mencapai 87%. Dengan tingginya biaya bahan baku yaitu CPO akan sangat berpengaruh terhadap harga minyak goreng (Hartoyo dkk, 2011).

Permintaan minyak goreng sawit yang mengalami peningkatan memiliki dampak ekonomi yang besar karena permintaan dan kelangkaan dari komoditi minyak goreng memiliki efek domino terhadap kebutuhan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga, industri makanan dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Kenaikan harga jual minyak goreng akhir-akhir ini, menjadikan minyak goreng sebagai pusat perhatian. Faktor *supply* dan *demand* menjadi kunci dalam penentuan harga minyak goreng yang juga memicu pada kelangkaan minyak goreng. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa negara Indonesia masih rawan dalam ketahanan pangan nasional, padahal kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air. Dengan data

mengenai luas perkebunan dan jumlah produksi sawit Indonesia saat ini dan Indonesia merupakan negara terbesar penghasil minyak kelapa sawit menjadi hal yang sangat di sayangkan terjadinya fenomena kelangkaan minyak goreng.

Pembahasan

Hakikat Kewaspadaan Nasional

Dalam 10 tahun terakhir, di Indonesia kurang berani dalam hal membahas tentang sejarah dan masa lalu bangsa contohnya membahas 4 pilar kebangsaan, Stabilitas Nasional, Wawasan Kebangsaan dan lain sebagainya. Apalagi bicara disituasi gerak reformasi dan demokratisasi, alasannya karena dianggap tidak reformis dan tidak mendukung gerakan reformasi. Pada orde baru alasan tersebut merupakan produknya.

Kehidupan Nasional telah kehilangan arah dan bahkan kebablasan akibatnya timbul sebuah berbagai ancaman. karena reformasi atau perubahan tersebut direspon secara berlebihan maka ini merupakan suatu keniscayaan. Kehidupan Nasional ini dianggap sudah tidak mengikuti aturan dan pedoman serta acuh tak acuh terhadap sikap. Karena demokrasi digunakan sebagai media untuk sebuah tujuan saja, hal inilah yang disebut dengan kewaspadaan. Kewaspadaan diartikan oleh banyak kalangan yaitu sekedar propaganda pemerintah untuk menjadi dalam mengendalikan perpolitikan nasional.

Namun saat ini kembali mulai muncul kerinduan terhadap tonggak sejarah bangsa, atau yang biasa disebut dengan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang dimana inti daripada kesadaran terhadap kewaspadaan nasional. Kewaspadaan Nasional merupakan sebuah sikap seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman yang erat kaitannya dengan nasionalisme, rasa peduli dan tanggung jawab. Baik ancaman yang berbentuk tradisional maupun non tradisional.

Kewaspadaan Terhadap Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng

Kewaspadaan Nasional diartikan sebagai sikap kesiapsiagaan dalam ruang lingkup bangsa Indonesia dalam melakukan aksi pencegahan secara menyeluruh terhadap bentuk potensi ancaman NKRI, kemudian mengantisipasi dan mendeteksi bentuk ancaman tersebut (Media Informasi Kementerian Pertahanan. 2017). Ketika berbicara tentang kewaspadaan nasional maka tidak bisa dipisahkan dari hubungannya dengan paradigma nasional. Paradigma Nasional diartikan sebagai pola nasional yang digunakan untuk mengatur sistem kehidupan nasional yang dimana meliputi Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Kewaspadaan nasional harus dimulai dari keyakinan ideologis dan nasionalistik yang kuat serta didukung oleh upaya pemantauan dini dan berkesinambungan terhadap implikasi kondisi dan kondisi yang berkembang di dalam dan luar negeri. Alasannya karena dalam paradigma nasional ditemukan pemahaman terkait kebangsaan, terdapat rasa kebangsaan, wawasan patriotik, jiwa dan semangat nasionalisme.

Pada era globalisasi saat ini, ancaman dimaknai sebagai situasi, tindakan atau potensi bahaya yang dirasakan dan nyata, yang berdampak pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Termasuk pada dewasa ini fenomena kelangkaan minyak goreng menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Karena apabila tidak diwaspadai akan menjadi sebuah ancaman juga bagi bangsa

Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng sebagaimana yang di kemukakan oleh salah seorang ekonom Rossanto Dwi Handoyo, S.E., M.Si., PhD dari Universitas Airlangga, bahwa mekanisme *supply and demand* merupakan salah satu faktor kelangkaan minyak goreng di pasaran. Jadi ada sisi penurunan dari penawaran dan sebaliknya ada sisi kenaikan dari sisi permintaan. Salah satu komoditas di Indonesia yang sangat penting karena tingkat inflasinya berpengaruh cukup tinggi yaitu minyak goreng. Menurunnya produktivitas produsen dalam memasarkan minyak goreng untuk wilayah domestik. Itu merupakan faktor utama penyebab dari sisi penurunan penawaran. Masyarakat dunia paling banyak berminat pada CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimana salah satu jenis minyak nabati yang saat ini di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga dari 1100 USD menjadi 1340 USD. Kemudian hal tersebut yang mengakibatkan produsen minyak sawit CPO lebih berminat untuk menjual minyak sawit mentah ke negara lain dibandingkan ke domestik, karena keuntungan dari produsen lebih besar.

Adapun faktor kedua yaitu kewajiban pemerintah terkait dengan program Biodiesel (B30). Yang dimana program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar dapat memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30 persen. Maka akhirnya konsumsi dipakai untuk produksi biodiesel padahal seharusnya untuk dipakai minyak goreng. Kemudian faktor ketiga adalah karena faktor pandemi Covid-19 yang belum usai sampai saat ini. Terkait ekspor CPO terdapat kenaikan permintaan di negara lain karena sudah banyak yang beralih dari minyak nabati ke CPO.

Adapun faktor lainnya yaitu produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Sehingga untuk mencapai titik-titik pasar dan daerah pedalaman memerlukan biaya logistik yang cukup besar yang mempengaruhi biaya keseluruhan produksi minyak goreng. Hubungannya dengan transportasi logistik, saat ini Shipping atau perkapalan hingga kontainer mengalami kenaikan harga dan lebih mahal dari sebelumnya. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Selain itu, CPO minyak goreng mayoritas dikuasai oleh swasta sehingga penetapan harga dilakukan secara tunggal oleh swasta (Unair News, 2022). Dengan kondisi pasar yang tidak sehat karena harga CPO di pasar dunia juga sedang mengalami kenaikan sehingga ketidaksiapan terhadap manajemen resiko sangat mempengaruhi. Maka disinilah semestinya kewaspadaan nasional sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman dari ketidaksiapan terhadap kelangkaan minyak goreng tersebut.

Perwujudan Bela Negara sebagai solusi Kelangkaan Minyak Goreng

Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya (Mukhtadi, 2018). Usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional merupakan dasar dari sikap dan perilaku pembelaan negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilakukan oleh setiap warga negara, kemudian dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Biasanya Bela negara selalu

dikaitkan dengan militer yang dimana dianggap bahwa kegiatan membela negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab hanya pada TNI. Padahal masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia sesuai yang tercantum pada Pasal 27 dan 30 UUD 1945. Menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi (Suryatni, 2019).

Dalam penyelenggaraan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, tentu ada beberapa aktor yang paling berperan dan paling berdampak dalam fenomena kelangkaan minyak goreng ini, yaitu Pemerintah (regulator), Pengusaha sawit (Produsen sekaligus distributor) dan masyarakat umum (konsumen). Dalam kondisi kelangkaan ketersediaan minyak goreng harus diutamakan kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. Regulator perlu membuat instrumen yang memaksa pengusaha sawit untuk menyediakan jumlah tertentu (jumlah minimal) bagi pasar dalam negeri. Minyak sawit di luar negeri lebih mahal dari pada dalam negeri. Secara naluriah pengusaha akan lebih suka mengekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri jika disparitas harga memang cukup tinggi. Padahal harusnya ada instrumen yang memaksa pengusaha sawit untuk menyediakan jumlah tertentu bagi pasar dalam negeri. Instrumen itu bukan anjuran tapi paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari celah dari sisi lingkungan. Bukankah kelapa sawit itu menyedot air? Pemerintah bisa menghitung kebutuhan air berlebihan tersebut sehingga ditemukan angkanya berapa persen produksi minyak sawit harus dipaksa jual dengan harga murah di dalam negeri. Kompensasi tersebut bersifat mutlak. Setelahnya ada tambahan lagi

kuota tertentu berapa persen akan menjadi insentif pemotongan pajak, dan seterusnya. Pembayaran pajak merupakan salah satu wujud bela Negara secara non-fisik sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan Negara dan kebutuhan pembangunan nasional. Pemenuhan kuota minyak goreng dalam negeri sudah seharusnya menjadi tanggungjawab seluruh pengusaha sawit yang dalam pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah (regulator).

Terdapat tiga dimensi penting dalam ketahanan yaitu *coping capacities* atau kapasitas masyarakat sebagai pelaku dalam mengatasi segala permasalahan; *adaptive capacities* atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dan belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghadapi masa yang datang; dan *transformative capacities* atau kemampuan dalam mendirikan kelembagaan yang bisa mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan dalam masa sekarang dan mendatang (Keck & Sakdapolrak, 2013). Oleh sebab itu, ketahanan sosial merupakan kemampuan untuk secepatnya kembali kepada keadaan semula bahkan mungkin menciptakan keadaan yang lebih baik artinya tidak hanya kemampuan untuk bertahan saja (Raharjo, 2018).

Untuk mengukur Ketahanan Sosial, salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengukur ketahanan sosial berdasarkan aset yang dimilikinya, salah satunya adalah modal alam (lingkungan), seperti tanah, air, kehidupan liar, biodiversitas, dan sumber daya lingkungan. Berkaitan dengan sumber daya untuk pembuatan minyak goreng, Tahun 1880-an, minyak kelapa (*coconut oil*) produksi masyarakat lokal masih mengisi kebutuhan pasar. Bahkan kalau harga pasaran sama, konsumen lebih memilih minyak goreng dari kelapa karena minyak goreng dari kelapa lebih sehat dan lebih harum. Setelahnya pasar diguyur minyak curah

dari sawit dengan harga yang jauh lebih murah. Saat itu penghasil sawit sedang berjuang untuk mencari pasar termaksud pasar domestik. Lambat laun minyak dari kelapa tersingkir hingga mati saat ini. Harga murah dari minyak sawit ibarat strategi menyingkirkan minyak kelapa dari pasar. Sehingga begitu tidak ada pesaing, harga minyak goreng bisa dikendalikan secara tunggal oleh pengusaha sawit. Diversifikasi bahan baku minyak goreng yang tadinya terjaga jadi hilang. Sehingga dengan adanya fenomena kelangkaan minyak goreng ini, walaupun sumbernya bukan dipengaruhi oleh ketersediaan kelapa sawit, tetapi langkah pemerintah bisa mengambil pelajaran dengan menggaungkan kembali program pembuatan minyak goreng dari kelapa secara mandiri, khususnya di daerah-daerah yang memiliki banyak pohon kelapa ataupun biji-bijian. Proses pembuatan minyak goreng dari kelapa bukan saja kegiatan ekonomi tapi juga sudah menjadi budaya masyarakat lokal dan menjadi tradisi turun-temurun. Program ini salah satu cara meningkatkan keberlanjutan ketahanan pangan dengan strategi menjaga kearifan lokal untuk menghadapi ketidakpastian pangan di masa depan.

Ketahanan minyak sawit mentah kita juga memprihatinkan karena serangan kekuatan mafioso yang dahsyat dan terus menerus di satu sisi dan lemahnya mental dan moral sebagian pejabat dan pengusaha yang mengurus masalah minyak sawit. Tanpa disadari, Indonesia sebenarnya sudah nyaris terjerumus dalam kaki-tangan mafia minyak sawit. Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan, Jaksa Penyidik telah menetapkan tersangka pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan beberapa tersangka dari pihak perusahaan swasta minyak goreng sawit atas dugaan penyelewengan fasilitas

ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*). Adapun perilaku tersangka merupakan perbuatan melawan hukum dibuktikan adanya 2 alat bukti, yaitu adanya permufakatan antara pemohon (perusahaan sawit) dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor (cnbcindonesia, 2022). Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistriburiskan CPO dan RBD Olein dengan harga tidak sesuai harga penjualan dalam negeri (*Domestic Price Obligation*). Juga tidak mendistribusikan 20 persen dari ekspor CPO dan RBD Olein ke pasar dalam negeri sesuai ketentuan DMO (*Domestic Market Obligation*). Hal ini menimbulkan ketakutan terhadap beberapa anggota perusahaan produsen minyak sawit terkait kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan ingin mundur dari program minyak goreng curah bersubsidi. Dalam hal ini sikap Bela Negara sudah seharusnya menjadi dasar dan semangat dalam setiap tindakan. Kegiatan Korupsi dan kolusi seharusnya sudah dari dulu dihilangkan, karena hanya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara. Mental bela Negara diharapkan mampu mengurangi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kelangkaan minyak goreng untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi sebaliknya kondisi kelangkaan minyak goreng menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bergotong royong menyelesaikan persoalan dari berbagai elemen masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing.

KESIMPULAN

Konsep Kewaspadaan Nasional adalah konsep yang harus terus hadir dalam sistem penyelenggaraan negara atau sistem nasional kita, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Termasuk

dalam menghadapi ketidaksiapan dalam penanganan kelangkaan minyak goreng. Sikap Bela Negara sudah seharusnya menjadi dasar dan semangat dalam setiap tindakan. Mental bela Negara diharapkan mampu mengurangi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kelangkaan minyak goreng untuk kepentingan dan keuntungan

pribadi, tetapi sebaliknya kondisi kelangkaan minyak goreng menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bergotong royong menyelesaikan persoalan dari berbagai elemen masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Cnbcindonesia. (2022). Begini Peran Pejabat Kemendag yang Jadi Tersangka Kasus Migor. Diakses pada 27 Mei 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220419163824-4-332899/begini-peran-pejabat-kemendag-yang-jadi-tersangka-kasus-migor>
- Damarani, Z. N., Sholihah, L. M., Zullaikah, S., Rachimoellah, M. (2019). Pra-Desain Pabrik Refined Bleached Deodorized (RBD) Olein dari Crude Palm Oil (CPO). *Jurnal Teknik ITS*. 8(1), 51-55.
- Databoks. (2022). Harga CPO Tembus US\$ 2.000 Per Ton di Bursa Komoditas Rotterdam. Diakses 27 Mei 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/harga-cpo-tembus-us-2000-per-ton-di-bursa-komoditas-rotterdam>
- Hartoyo, S. Intan, E., Novindra, Hastuty. (2011). Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawit Domestik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 11(2), 169-179.
- Keck, Markus & Sakdalporak, P. (2013), "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward, dalam *Erkunde*. 67(1), 5-19.
- Kementerian Perindustrian RI. 2021. *Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional*, Jakarta: Pusdatin Kemenperin.
- Larasati, N., Chasanah, S., Machmudah, S., Winardi, S. (2016). Studi Analisa Ekonomi Pabrik CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) Dari Buah Kelapa Sawit. *Jurnal Teknik ITS*. 5(2). 212-215.
- Media Informasi Kementerian Pertahanan. 2017. *Kewaspadaan Nasional, Bela Negara Dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Puskom Publik Kemhan
- Mukhtadi & Komala, R. M. (2018). Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial dalam Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Manajemen Pertahanan*. 4(2), 64-83.
- Purba, W. & Ardiyanti, D. (2021). Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia Dalam Ekspor Kelapa Sawit Ke India Tahun 2014-2019. *Jurnal FISK*. 2(1). 133-140.
- Raharjo, S.N.I (ed), 2018, Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Catatan Pendahuluan, dalam *Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik*, Jakarta: LIPI.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30-38. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Suryatni, L. (2019). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10(1), 49-63.
- Soepandji, K. W. & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(3), 436-456.

<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>

Unairnews. (2022). Ekonom UNAIR Paparkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. Diakses 27 Mei 2022, dari <https://news.unair.ac.id/2022/02/25/ekonom-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara